



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama”
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 03);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.3.236.135.543.700,00	
2. Bertambah	Rp.321.758.265.300,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.3.557.893.809.000,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp.3.180.421.258.000,00	
2. Bertambah	Rp.332.111.259.296,32	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.3.512.532.517.296,32
Surplus setelah Perubahan		Rp. <u>45.361.291.703,68</u>
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.30.000.000.000,00	

2. Bertambah	Rp.43.503.308.296,32	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.73.503.308.296,32
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.85.714.285.700,00	
2. Bertambah	Rp.33.150.314.300,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.118.864.600.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		(Rp.45.361.291.703,68)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp.0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.493.861.586.700,00	
2. Bertambah	Rp.23.734.203.800,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp.517.595.790.500,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.2.736.474.729.000,00	
2. Bertambah	Rp.298.024.061.500,00	
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan		Rp.3.034.498.790.500,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp.5.799.228.000,00	

2. Bertambah/berkurang	Rp.0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp.5.799.228.000,00

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a” terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.153.306.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.9.857.536.500,00	
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan		Rp.163.163.536.500,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.20.506.936.700,00	
2. Bertambah	Rp.28.750.000,00	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan		Rp.20.535.686.700,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.19.995.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.2.245.107.300,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.22.240.107.300,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.300.053.650.000,00	
2. Bertambah	Rp.11.602.810.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp.311.656.460.000,00

Pasal 4

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b” terdiri dari jenis pendapatan

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.2.323.745.788.000,00	
2. Bertambah	Rp.139.900.928.800,00	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp.2.463.646.716.800,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.412.728.941.000,00	
2. Bertambah	Rp.158.123.132.700,00	
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp.570.852.073.700,00

Pasal 5

Pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c” terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.5.799.228.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 5.799.228.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah	Rp.0,00	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan		Rp.0,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi		
1. Semula	Rp.2.063.703.534.492,00	
2. Bertambah	Rp.201.460.925.033,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		Rp2.265.164.459.525,00
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.325.910.054.734,00	
2. Bertambah	Rp.109.403.905.513,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp.435.313.960.247,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.15.000.000.000,00	
2. Berkurang	(Rp.4.120.291.250,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.10.879.708.750,00
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp.775.807.668.774,00	
2. Bertambah	Rp.25.366.720.000,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp.801.174.388.774,00

Pasal 7

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pasal 6 pada huruf a” terdiri dari
- a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.949.139.526.937,00	
2. Bertambah	Rp.79.591.797.740,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp.1.028.731.324.677,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.809.053.455.455,00	
2. Bertambah	Rp.49.105.162.293,00	.
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp.858.158.617.748,00
c. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.9.767.858.000,00	
2. Bertambah	Rp.1.932.142.000,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp.11.700.000.000,00
d. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp.0,00
e. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.278.781.944.100,00	
2. Bertambah	Rp.70.685.823.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp.349.467.767.100,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.16.960.750.000,00	
2. Bertambah	Rp.146.000.000,00	

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp.17.106.750.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pasal 6 pada huruf b terdiri dari		
a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp.350.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.809.416.000,00	
Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan		Rp. 1.459.416.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp.53.511.286.121,00	
2. Bertambah	Rp.15.753.080.957,00	
Jumlah Belanja modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan		Rp.69.264.367.078,00
c. Belanja Modal bangunan dan gedung		
1. Semula	Rp.93.783.259.950,00	
2. Bertambah	Rp.7.413.231.492,00	
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp.101.196.491.442,00
d. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi		
1. Semula	Rp.158.346.624.832,00	
2. Bertambah	Rp.88.868.702.895,00	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp.247.215.327.727,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp.16.478.358.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.0,00	
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 16.478.358.000,00
f. Belanja modal aset lainnya		

1. Semula	Rp.3.440.525.831,00	
2. Berkurang	(Rp. 3.440.525.831,00)	
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp.0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yakni

Belanja Tidak terduga		
1. Semula	Rp.15.000.000.000,00	
2. Berkurang	(Rp.4.120.291.250,00)	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan		Rp.10.879.708.750,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp.17.781.770.670,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.45.000.000,00	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 17.826.770.670,00
b. Belanja Bantuan keuangan		
1. Semula	Rp.758.025.898.104,00	
2. Bertambah	Rp.25.321.720.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp.783.347.618.104,00

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.30.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.43.503.308.296,32	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 73.503.308.296,32
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.85.714.285.700,00	
2. Bertambah	Rp.33.150.314.300,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp.118.864.600.000,00

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a” terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. Semula	Rp.30.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.43.503.308.296,32	
Jumlah sisa lebih perhitungan Tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp.73.503.308.296,32
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.0,00	
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.0,00
g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.0,00	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.0,00

b. Penyertaan modal daerah		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Bertambah	Rp.2.500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp.2.500.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1. Semula	Rp.85.714.285.700,00	
2. Bertambah	Rp.30.650.314.300,00	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.116.364.600.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Berkurang	Rp.0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp.0,00	
2. Berkurang	Rp.0,00	
Jumlah pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.0,00

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (Inventasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal, September 2023

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI